



DONASI COVID-19 DIY CAPAI RP 1 MILIAR

Tindak Tegas Pelanggaran Perlu Payung Hukum

YOGYA (KR) - Aneka pelanggaran masih dilakukan masyarakat seperti kedatangan pemudik, ramainya sejumlah jalan raya, menjamurnya gelandangan dan pengemis (gepeng) dadakan, pembagian bantuan di jalanan dan sebagainya selama masa tanggap darurat Covid-19 di DIY.

Melihat kondisi tersebut, Pemda DIY melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 terus berupaya memaksimalkan pencegahan dan penyebaran Covid-19 di DIY dengan meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum sehingga memerlukan payung hukum agar dapat ditindak dengan tegas.

Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Noviar Rahmad mengatakan masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sementara yang dapat dilakukan petugas hanya melakukan imbauan

dan edukasi. Bahkan, belakangan mulai bermunculan pengemis dadakan yang mayoritas pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka sengaja menunggu donatur yang membagikan bantuan di pinggir jalan, padahal camp assessment Dinas Sosial (Dinsos) tutup sementara selama Covid-19.

"Masih banyak pendatang ke DIY yang masuk melalui jalur-jalur alternatif maupun melalui Terminal Giwangan. Ditambah pula ada masjid di wilayah DIY yang masih melaksanakan salat Jumat dan Tarawih secara berjemaah," kata

Noviar di Yogyakarta, Jumat (1/5).

Noviar menyampaikan melihat kondisi tersebut, pihaknya meminta agar diberikan payung hukum agar para petugas dapat melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melanggar kebijakan. Pihaknya sekaligus mengingatkan masyarakat dilarang untuk memberikan santunan baik uang maupun barang di jalan bagi gepeng atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kebijakan tersebut sesuai dengan Perda DIY No 1 Tahun 2014 Pasal 22 mengenai Penanganan Gepeng yang berlaku sejak 1 Januari 2015.

"Bagi donatur kami sarankan memberikan santunan dengan memprioritaskan penduduk atau warga yang berada di sekitar tempat tinggal masing-masing.

Untuk wilayah Malioboro, sudah diberikan imbauan berupa Surat Edaran dari UPT Malioboro yang berisi larangan bagi masyarakat untuk memberikan santunan," ujar Noviar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY ini menegaskan, di samping itu perlu adanya penguatan kerja sama resmi dengan Forum Koordinator Pimpinan antar kecamatan (For-kompinca) di Kabupaten/Kota se-DIY untuk dapat melakukan pengontrolan di jalan-jalan alternatif maupun jalan wilayah kecamatan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dari pemudik yang datang dari wilayah zona merah. Pemda DIY secepatnya akan melayangkan surat permohonan kepada Kanwil Kemenag DIY agar segera mengeluarkan imbauan atau instruksi untuk masjid atau tempat

ibadah yang masih menggelar kegiatan peribadatan secara massal.

Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Ajun Eka Priyanti mengungkapkan Pemda DIY telah menghimpun dana bantuan yang berasal dari donatur baik institusi maupun personal sejak masa tanggap bencana Covid-19 DIY diberlakukan. Jumlah dana yang terkumpul adalah Rp 1.028.350.513 per Rabu (29/4). Adapun dana tersebut belum dialokasikan ke pos terkait.

"Dananya masih utuh, kami masih menunggu arahan dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 saat ini. Selain berupa uang, bantuan yang diterima berupa barang seperti alat pelindung diri (APD), face shield, masker, hand sanitizer, baju hazmat, sembako hingga vitamin," imbuh Ajun. (Ira)-g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005